



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LAKIP 2022
DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKJIP Dinas Kebudayaan Tahun 2022 merupakan Bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis berdasarkan indicator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang

Tanjungpinang, Pebruari 2023
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Drs H.M.JURAMADI ESRAM,MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



DAFTAR ISI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2022 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Fungsi dan Tugas	4
1.3. Kepegawaian	4
1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung	6
1.5. Keuangan	8
1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	9
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perencanaan Strategis	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022	16
2.3.1. Target Belanja Dinas Kebudayaan	16
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
3.2.1. Target Belanja Dinas Kebudayaan	29
3.2.1. Solusi	29
3.3. Akuntabilitas Keuangan	64

BAB IV. PENUTUP	67
4.1. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2022	69
Lampiran	



DAFTAR TABEL

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LAKIP 2022
DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1.2	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.3	Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2022	6
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2022.....	8
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	13
Tabel 2.2	Perjanjian kinerja tahun 2022	15
Tabel 2.3	Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2022	16
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....	16
Tabel 3.1	Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022.	19
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	21
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	26
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.....	32
Tabel 3.7	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni	39
Tabel 3.9	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton pertunjukan seni	41
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase warisan budaya tak beda yang ditetapkan terhadap total registrasi	46

Tabel 3.11	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi	48
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi	51
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase benda, bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	53
Tabel 3.14	Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	56
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	59
Tabel 3.16	Persentase Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	62
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	65



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Tahun 2022-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indicator sasaran 7 (tujuh) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Rincian capaian kinerja Dinas Kebudayaan yang dihasilkan di tahun 2022, dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
	sasaran	Target	Realisasi	%	Kriteria
Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	28,11	28,11	100	baik
Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekspresi budaya	1,49	1,61	108,35	Sangat baik
	Nilai Warisan Budaya	48,84	49,54	101,43	Sangat baik

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % ***Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya dan Meningkatkan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu*** Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Di luar indikator sasaran strategis, capaian kinerja Dinas Kebudayaan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Pelestarian Fisik Kebudayaan (Cagar budaya, dan Pelestarian Non Fisik Kebudayaan (Seni, Adat Tradisi, Lembaga Budaya, Bahasa, Sastra, Sejarah, dan Warisan Budaya Tak Benda). Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan ke depan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan perangkat regulasi teknis terkait dengan pelestarian, pengawasan, dan pengembangan seni budaya di Provinsi kepulauan Riau.
2. Kurangnya minat generasi muda dalam melestarikan seni, adat, dan tradisi
3. Pemahaman masyarakat berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan warisan budaya yang perlu ditingkatkan dan pelaksanaan program berkaitan dengan fisik warisan budaya melewati tahapan sosialisasi dan usulan masyarakat yang cukup memakan waktu.
4. Minimnya penggunaan bahasa, sastra, dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Masih kurang kuatnya eksistensi Rintisan kabupaten/ kota sehingga akses terhadap anggaran pembangunan kewilayahan menjadi terbatas.
6. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa untuk dibatalkan, serta adanya perubahan konsep kegiatan secara daring/online sesuai dengan himbauan dari Pemerintah. Sehingga diperlukan kreativitas untuk menampilkan event budaya yang berkualitas dan tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat luas.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I **PENDAHULUAN**

LAPORAN **AKUNTABILITAS KINERJA** **INSTANSI PEMERINTAH** **LAKIP 2022** **DINAS KEBUDAYAAN** **PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Bab I Berisi :

1. Struktur organisasi
2. Fungsi dan tugas
3. Keadaan Pegawai
4. Sarana dan Prasarana
5. Keuangan
6. Isu Strategi
7. Sistematika LKP IP

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini

merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
2. Mendorong Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kebudayaan kepulauan Riau dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

1.1. Struktur Organisasi

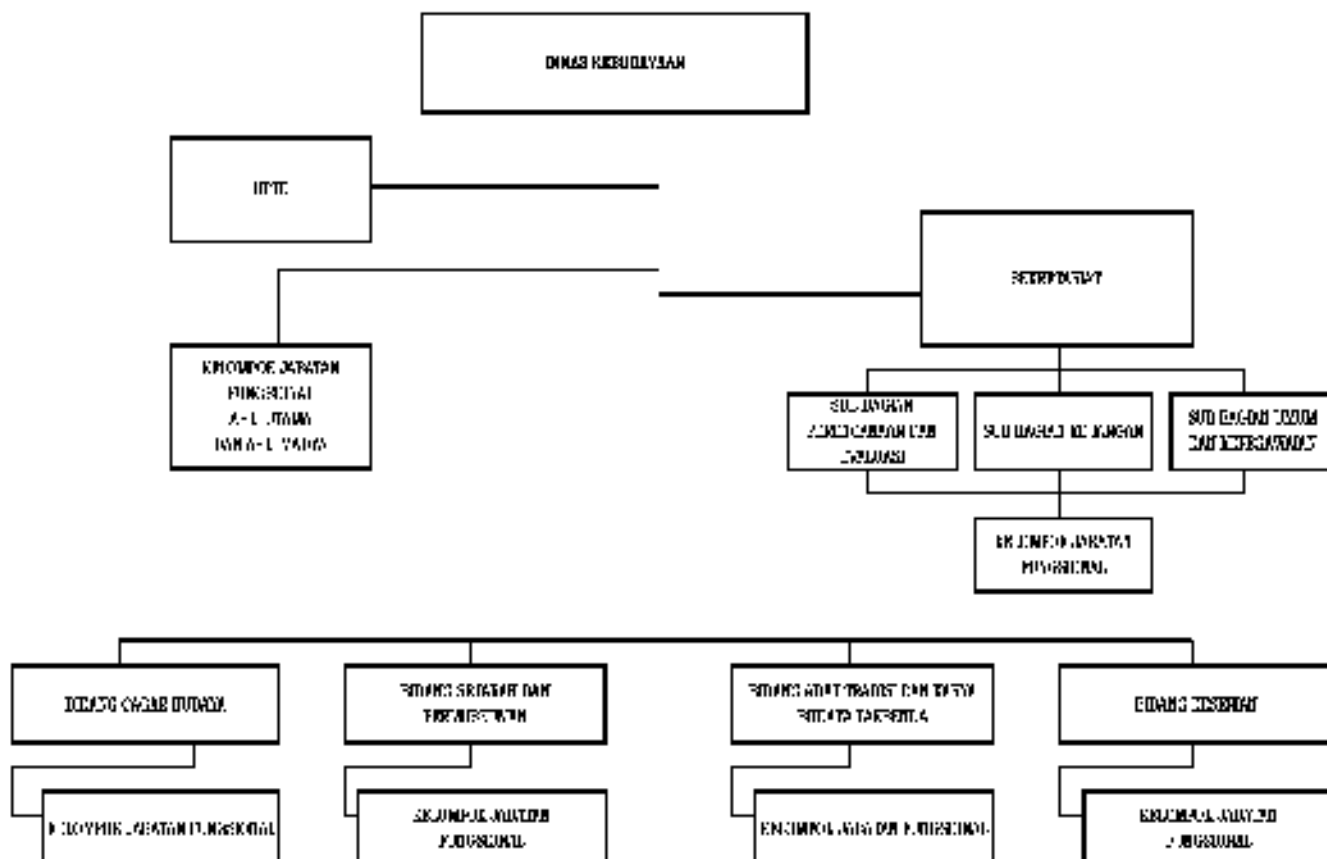
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta berdasarkan draft Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja, maka terdapat beberapa perubahan organisasi struktur dan tata laksana baru serta tupoksi baru. Berdasarkan peraturan daerah yang lama (Perda No. 4 tahun 2011) terdapat 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu:

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
- 3) Bidang Sejarah dan Tradisi
- 4) Bidang Kesenian, dan
- 5) Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan

Selanjutnya ke-empat bidang tersebut diatas akan berganti menjadi 1 Sekretariat dan 4 (empat) bidang baru yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Cagar Budaya;
- 3) Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda;
- 4) Bidang Sejarah dan Permuseuman,
- 5) Bidang Kesenian

OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2. Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
- d) pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 6 jabatan structural 12 Fungsional dari Penyetaraan dan fungsional Umum 2 orang . Potensi sumber daya asn Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2021) sebanyak: sebanyak 75 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 34 orang, PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 19 orang

dan THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 22 orang Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34	50	
2	Non- PNS	41	25	16
Jumlah		75	75	75

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pegawai Negeri	31	1	4	25	2	2		
2	Tenaga Kontrak / PTT	35			7	7	24		3
	Total	66	1	4	32	10	26	0	3

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2022.

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural, pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perincian Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2022

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
A	Gedung Perkantoran		
1.	Gedung Dinas Kebudayaan	Unit	1
2.	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Gedung Kesenian	Unit	1

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
B	Kendaraan Bermotor		
3.	Mobil	Unit	4
4.	Sepeda Motor	Unit	5
C	Prasarana dan Sarana Kantor		
5.	Meja Kerja	Unit	82
6.	Kursi	Unit	182
7.	Lemari dan Brankas	Unit	2
8.	Lemari dan Filling Cabinet	Unit	94
9.	Lemari lainnya	Unit	10
10.	Air Conditioner dan AC Split	Unit	37
11.	Air Cooler	Unit	3
12.	LCD dan layar	Unit	4/6
13.	Televisi	Unit	6
14.	Camera	Unit	7
15.	Handycam	Unit	4
16.	Kulkas	Unit	5
17.	Sound System	Set	1
D	Peralatan Kantor		
18.	Komputer PC	Unit	52
19.	Laptop	Unit	43
20.	Printer	Unit	83
21.	UPS/power suply	Unit	37
E	Alat Musik		
23.	Kelengkapan alat musik	Set	1
24.	Alat Musik Melayu	Set	1
F	Benda Budaya	Set	1
G	Pakaian Tari	Stel	750

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2022

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan “jantungnya” Dinas

Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**, benar-benar dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

1.5. Keuangan

Untuk melaksanakan program/kegiatan selama Tahun 2022, Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 7.200.955.354 anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 7.090.682.711 (98,47%). Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2022

No.	Sumber Dana BL Dan BTL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	%
1.	APBD	17.040.930.929	16.684.932.501	355.998.428	97,91

1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
2. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.
3. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
4. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-*infiltrasi* dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Strategis disini maksudnya adalah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sisi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Memaparkan Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memaparkan Perencanaan Startegis Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memaparkan capaian Kinerja Tahun 2022 Evaluasi dan Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Memaparkan hasil ringkas laporan kinerja permasalahan dan rencana aksi

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LKJIP.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2022 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Bab II Berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian kinerja tahun 2022
3. Rencana Anggaran Tahun 2022
4. Instrumen

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan manifestasi komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026). RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dan dituangkan dalam tabel Visi Misi dan Sasaran Daerah sebagai berikut :

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya	Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya 2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu

Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah “**1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya 2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**” dengan indikator capaian sasaran “**Nilai Ekonomi Budaya ,Nilai Warisan Budaya, Nilai Ekspresi Budaya**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

➤ Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun anggaran adalah: **1. Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya 2. Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**

➤ Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, holistic dan komprehensif. Proses Pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program, dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan/proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	%	28,11	28,16	28,21	28,24	28,27
2	Meningkatnya	Nilai Ekspresi	%	1,	1,55	1,61	1,65	1,69

	Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Budaya		49				
		Nilai Warisan Budaya	%	48,84	49,64	50,44	51,24	52,04

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dijelaskan melalui tabel berikut :

N O	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Pengembangan kesenian Tradisional	1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu”	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
			2. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Program Pembinaan Sejarah	1. Pembinaan sejarah local provinsi
		Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar budaya	2. Penetapan Cagar budaya Tingkat Provinsi

		Program Pengelolaan Permuseuman	1. Pengelolaan permuseuman Provinsi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, menjadi instrumen bagi perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. D

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

2.2 Perjanjian kinerja tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	%	28,11
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya	Nilai ekspresi budaya	%	1,49

	Melayu"			
		Nilai	%	48,84
		Warisan		
		Budaya		

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 17.335.070.424 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 8.132.734.800 dan Belanja Langsung Rp 9.202.335.624. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 17.040.930.929,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.839.975.575,00 dan Belanja Langsung Rp 7.200.955.354,00.

2.3.1 Target Belanja Dinas Kebudayaan

Tabel 2.3 Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan Tahun 2022

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.839.975.575,00	57,74
Belanja Langsung	Rp 7.200.955.354,00	42,26
Total	Rp.17.040.930.929	100

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 Dinas Kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Rp.2.163.487.714	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu”	Rp.3.968.980.528	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran



BAB III **AKUNTABILITAS** **KINERJA**

LAPORAN **AKUNTABILITAS KINERJA** **INSTANSI PEMERINTAH** **LAKIP 2022** **DINAS KEBUDAYAAN** **PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Bab III Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
4. Realisasi Anggaran

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 CAPAIAN KINERJA**

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja

Tabel 3.1**Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2022**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Skor
1	Lebih dari 100%	Sangat baik	Sangat baik
2	75% sampai 100%	Baik	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang	Kurang

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja tahun 2022

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) selama tahun 2022

1. Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya,

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam **Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya** Provinsi kepulauan Riau, melalui 1 (satu) Indikator kinerja sasaran ,yaitu

- a. Nilai Ekonomi budaya

2. Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu”

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam **Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu** Provinsi kepulauan Riau, melalui 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran ,yaitu

- a. Nilai Ekpresi budaya
- b. Nilai Warisan Budaya

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2022
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2022		
	sasaran	Target	Realisasi	%	Kriteria
Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	28,11	28,11	100	baik
Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekspresi budaya	1,49	1,61	108,35	Sangat baik
	Nilai Warisan Budaya	48,84	49,30	100,94	Sangat baik

Berdasarkan Tabel diatas ada 3 (tiga) indikator sasaran untuk mendukung sasaran 1 yaitu Nilai ekonomi Budaya sebesar 28,11 % realisasi 28,11 capaian 100% dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini *baik* , Pada indicator kinerja sasaran 1 yaitu nilai ekonomi budaya dengan capaian kinerja 100% ini merupakan bentuk komitmen dari dinas kebudayaan untuk dapat memprioritaskan upaya ekonomi dalam bidang kebudayaan dengan melakukan pembinaan pelestarian tradisional kepada pelaku seni sehingga mereka dapat memberikan kreativitas mereka dalam pemajuan kebudayaan dikepulauan riau ,salah satu alat ukur dalam perhitungan nilai ekonomi budaya adalah variable atau orang dan Lembaga dengan menggunakan jumlah data pelaku yang berusia 15 tahun keatas.

dan indicator sasaran 2 yaitu nilai ekspresi budaya sebesar 1,49 % realisasi 1,61 % capaian 108,35 % ,capaian ini dapat di kategorikan **Sangat Baik** , Pada indicator sasaran 2 yaitu nilai ekspresi budaya maksud dari nilai ekspresi budaya ini adalah Pemerintah memiliki amanah Undang-undang dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya tentang kekayaan karya budaya daerah, salah satunya tentang pengetahuan ekspresi budaya tradisional, mencakup bentuk karya seni. Ekspresi budaya tradisional ini dapat terbagi dua yaitu warisan budaya berbentuk warisan benda (tangible) dan warisan tak benda (intangible). Bentuk ekspresi sebuah budaya tradisional (expression of folklore) yang mengandung nilai-nilai dan kearifan ragam budaya masyarakat lokal suatu daerah baik dalam bentuk warisan budaya berbentuk benda maupun warisan budaya tak benda (WBTB). Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya pada tahun 2022 berhasil mengalami peningkatan, dengan capaian persentase nilai ekspresi budaya sebesar 1,49 %.Kegiatan yang mendukung dalam ketercapaian indicator inilah adalah Kunker Presiden ke Lagoi Bay Kab. Bintan – Tari Persembahan, Kompang, Silat dan Musik Melayu - Januari 2022 ,Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Tanjungpinang – Tari Persembahan – Februari 2022 , Syukuran 1 tahun Kepemimpinan Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad – Tari Persembahan 29 Februari-1 Maret 2022 , Penandatanganan Mou Pembangunan International Circuit Ground Breaking – Tari Persembahan – Maret 2022 Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau – Tari Persembahan - Maret 2022 ,HUT PKK Ke 50 – Tari Persembahan - Maret 2022 ,Kenduri Seni Melayu – Tari Persembahan dan Tari Kreasi Melayu-Juli 2022,

Pembukaan Pelatihan tentang Food Security Revolution 4.0 and Supply Chain Program.

nilai warisan Budaya sebesar 48,84 % realisasi 49,30 % capaian 100,94 % ,capaian ini dapat di kategorikan **sangat Baik**. Nilai warisan budaya terdiri dari 5 (lima) variable didalam nya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Rumus Formula
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (775)/jumlah penduduk 15 thn ke atas(1.550.309)*100 (sumber ipk direktorat kebudayaan)
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Jumlah penduduk yang penduduk yang terlibat lgs sebagai pelaku seni/total penduduk 10 tahun keatas (1.692.816)
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan	target penduduk yng menonton pertunjukan seni 10 thn keatas (40.424) /jumlah penduduk yg mnntn secara lgs

	seni	pertunjukan seni 10 tahun keatas (1.692.810)
	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total	target wbtb yang telah ditetapkan /jumlah total wbtb yg teregister
	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	jumlah sejarahwan yang berkompetensi /total sejarahwan kepri
	Persentase benda, bangunan,struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	jumlah benda bangunan struktur,situs,dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan (9.998)/total registrasi (10.218)* 100
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	jumlah penduduk usia 10 tahun yg mengunjungi peninggalan sejarah/total penduduk usia 10 tahun (1.692.810)

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

	Indicator sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian dengan 2022 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber	28,06	28,11	28,11	100	28,27	99,43

	penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)						
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1,43	1,49	1,61	100,35	1,69	88,17
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	47,03	51,01	51,44	100,85	66,93	76,89
4	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	23,45	16,75	18,43	110,05	20,55	89,70
5	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	20,00	40,00	33,33	100	100	83,33
6	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	30,06	31,75	30,51	96,10	49,23	61,98
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	12,04	12,76	13,17	100,86	15,06	87,45

Dari tabel di atas, terdapat 2 (satu) sasaran yang terbagi dalam 7 (tujuh) indikator. Pada tahun 2022, dari 7 (tujuh) indikator ada 1(satu) indicator yang tidak memenuhi target yaitu Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

telah ditetapkan terhadap total registrasi capaian kinerja nya hanya sebesar 97,54% ini dikarenakan dari 9 target Cagar budaya yang ditetapkan hanya 1 yang dapat ditetapkan, untuk itu Dinas kebudayaan Provinsi tahun 2023 akan segera menggesa kabupaten /kota khususnya kabupaten bintan untuk dapat segera melakukan penetapan cagar budaya tingkat provinsi dengan bekerja sama dengan BPCB Batusangkar Sumatera Barat, untuk indikator lainnya pencapaian kinerja sudah melebihi target yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 100% dengan capaian kinerja '**sangat baik**'

Dari 7 (tujuh) indikator tersebut dapat dianalisa keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2022 yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas budaya
2. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
3. Adanya program-program terkait pelestarian dan pengembangan kebudayaan

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dicerminkan dalam capaian 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran "**Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya dan Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu**" sebagai berikut :

1. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas)
2. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan
4. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
5. Persentase SDM sejarawan yang berkompetensi
6. Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasacagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
7. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas)

Salah satu indikator kinerja Program di Bidang kesenian adalah Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun keatas) dengan formula indikator penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan /jumlah penduduk 15 thn ke atas*100 dengan target 28,11% pada tahun 2022 dan dengan capaian kinerjanya 100%.

Salah satu tujuan utama dari Pemajuan Kebudayaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan secara optimal potensi kebudayaan yang ada. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang menjadikan Objek Pemajuan Kebudayaan (terutama seni) sebagai sumber penghasilan menjadi hal yang cukup penting untuk diukur sebagai salah satu indikator kinerja program. Seperti tampak pada tabel di atas, evaluasi pada tahun 2022 capaian yaitu indikator kinerja program “nilai ekonomi budaya ” telah menargetkan yang direncanakan yaitu sebesar 28,11%, artinya terdapat setidaknya 814 orang yang memperoleh penghasilan dalam peran mereka sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni untuk setiap 1.550.309 penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Survei yang dilakukan oleh bidang kesenian dan bekerjasama dengan kabupaten kota disetiap kegiatan yang dilakukan baik itu di kabupaten atau pun kota. Pencapaian target ini tidak terlepas dari inisiatif pelaku/pendukung pertunjukan seni untuk terus mengembangkan mata pencahariannya. Meskipun demikian pencapaian ini tidak terlepas dari pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai penghasilan. Pencapaian ini bisa ditingkatkan apabila pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan keberlangsungan pertunjukan seni dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai pendukung indikator kinerja program yang telah ditentukan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai.

Hasil evaluasi penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan dengan target sebesar 28,11 % dapat tercapai sebesar 28,11 % sehingga capaian kinerja sebesar 100% dalam kategori kinerja “**baik**”.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan dari Tahun 2021 sampai dengan 2022:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	penduduk usia 15 thn keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	28,06	28,11

Sumber data : Bidang Kesenian



dari tabel 3.5 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya,. pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator penduduk usia 15 tahun keatas sebagai pendukung pelaku yang dijadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan pada tahun 2022 mencapai 28,11 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2021 yang hanya mencapai 28,06 % maka dapat disimpulkan

bahwa pada tahun 2022 telah terjadi kenaikan sebesar 0,053 %.

Realisasi Jumlah Pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) pada Tahun 2022 capaian tahunan indikator untuk capaian kinerja nya sebesar 28,11 % dengan jumlah 814 orang dan didukung oleh 24 Lembaga. Dapat dikategorikan capaian kinerja-nya “**sangat baik**”, capaian ini sesuai target yang ditetapkan sebesar 814 orang dan dari sasaran lembaga mengalami peningkatan 100% terjadi peningkatan yang signifikan ini dikarenakan adanya kegiatan pendukung cruscutting antar Bidang di Kebudayaan.

Tercapainya indikator ini yaitu didukung pada kegiatan Seleksi Gita Bahana Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Fasilitas Pelestarian Kesenian Tradisional pada Event Festival Kompang, Sholawat dan Festival Musik Se-Kepri dan Hibah Lembaga Tahun Anggaran 2022. Peningkatan yang signifikan terjadi disebabkan adanya kegiatan fasilitasi pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Kota berkerjasama dengan komunitas/ lembaga di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Intervensi yang dilakukan pembinaan pelestarian kesenian tradisional yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 5 tentang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017, menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola kesenian yang sesuai dengan amanat UU. Dimulai dari tatakelola kebijakan dari Kabupaten/kota yang melibatkan masyarakat luas, khususnya para pelaku budaya di daerah, hal ini juga dipertegas dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2022 dalam memajukan kebudayaan daerah. Pembinaan Pelestarian Kesenian Tradisional Salah satu tugas pokok Bidang Kesenian dimana menurut UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dijelaskan; Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Merujuk pada sasaran strategis kinerja Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dibagi dalam 3 (tiga) Sub Sasaran Target Capaian Kinerja terdiri dari unsur Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya), Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi dan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Dapat digambarkan pada Grafik ini Pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 28,06 % atau 775 pelaku budaya yang menjadikan sumber penghasilan dan pada tahun 2022 capaian kinerja di capaian sudah sesuai dengan target yang ditetapkan kan didalam perjanjian kinerja sebesar 28,11% ,dapat dilihat di setiap tahun ada peningkatan pada capaian kinerja sebesar 0,053 % atau 814 pelaku budaya.

NO	Jumlah Pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	PELAKU BUDAYA		TOTAL
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	354	364	718
2	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	5	-	5
3	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	416	450	866
	TOTAL SECARA KESELURUHAN	775	814	1.589

3.2.1. Kendala Yang dihadapi

- Masih kurangnya peningkatan pelaksanaan standarisasi di bidang profesi, khususnya bidang kesenian, termasuk seni media (dan teknologi perfilman) di skala provinsi Kepulauan Riau dan pelaksanaan standarisasi profesi bidang kesenian di Kabupaten/kota.
- Masih belum optimalnya pengembangan jaringan informasi kebudayaan sehingga menunjang eksistensi penyelenggaraan kegiatan seni budaya di daerah.
- Belum optimalnya advokasi lembaga dalam upaya peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga/organisasi budaya dan komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan.
- Perbedaan nomenklatur dikarenakan ditemui masih berbedanya nomenklatur OPD Provinsi dengan Kabupaten/kota sehingga Provinsi sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas).

3.2.2. Solusi

- Melakukan regulasi tentang penetapan pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kesenian skala provinsi, di ikuti dengan kabupaten sehingga mewujudkan arah kebijakan yang selaras dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan Nasional.
- Memberikan arah kebijakan di skala provinsi dan kabupaten/kota terhadap peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
- Menciptakan dan meningkatkan pelaksanaan dan/atau pengelolaan infrastruktur bidang kesenian (Pusat Kebudayaan Daerah). Pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan skala provinsi (misalnya Taman Budaya), dan berkerjasama dengan pengelolaan

kegiatan kesenian yang ada di skala kabupaten/kota.

- Dipandang perlu untuk melakukan rakor kebudayaan Se-Provinsi Kepulauan Riau, mendukung evaluasi bidang kesenian di wilayah Kabupaten Kota.
- Rancangan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dirancang menitik beratkan pada peningkatan pada penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- Memprioritaskan pagu kegiatan Bidang Kesenian yang berorientasi pada Ekonomi Budaya dengan peningkatan pencapaian indikator sehingga tepat sasaran.
- optimis akan mencapai target pada akhir RPJMD nanti.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kesenian tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.506.034.870	1.305.722.740	Jumlah pelaku budaya yang ditingkatkan	✓	

2. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius, terutama dalam otonomi daerah dan era globalisasi. Pentingnya keberadaan budaya daerah, karena budaya ini dalam kenyataannya memberi andil yang sangat besar bagi pembentukan jati diri bangsa, dan juga bagi proses regenerasi bangsa kita. Sehubungan dengan hal tersebut, kita harus segera menyadari dan tidak terpukauan pada budaya asing yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan kini kita mesti lebih fokus pada budaya kita sendiri yakni budaya Indonesia yang di dalamnya tercakup beranekaragam budaya daerah. Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak kekayaan budaya daerah peninggalan masa lalu yang berwujud benda maupun non-benda. Pada masa kekuasaan kesultanan Riau Lingga meninggalkan banyak karya budaya seperti situs-situs budaya, makam, masjid, benteng, istana, dan sebagainya. Pulau Penyengat dan Pulau Bintan yang merupakan pulau dimana pernah menjadi pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda Kesultanan Riau Lingga dan menyimpan banyak karya budaya dan karya sastra. Seiring dengan perkembangan jaman banyak hal yang bisa membuat kebudayaan tersebut punah bahkan tidak dikenal jika kita sendiri tidak berusaha untuk menjaga dan melestarikannya. Dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara baik oleh Pemerintah, masyarakat, komunitas budaya dan lembaga Adat. Adapun dalam mendukung kelestarian budaya dan menjaga budaya daerah adalah : - Mau mempelajari dan mempublikasikan budaya daerah tersebut. - Berpartisipasi dalam rangka menjaga, melindungi situs-situs cagar budaya dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya lokal. - Mengajarkan budaya lokal pada generasi penerus sehingga kebudayaan tersebut tidak musnah dan tetap dapat bertahan -

Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain - Mengimplementasikan penggunaan budaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Mengingat pentingnya pelestarian dan perlindungan budaya daerah, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat dan melaksanakan program kegiatan “Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan”. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap karya Warisan Budaya Tak Benda yang sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Kepulauan Riau yaitu Ratih Saman Lingga Tahun 2018, Silat Pengantin Kepulauan Riau Tahun 2018 dan Lipat Kain 44 tahun 2019 dan pembinaan kelembagaan peningkatan kapasitas Lembaga Adat dan Sumber Daya Manusia melalui bantuan Hibah

Hasil evaluasi Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dengan target sebesar 1,49 % dapat tercapai sebesar 1,61 % sehingga capaian kinerja sebesar 100,35 % dalam kategori kinerja “ **Sangat baik**”.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dari Tahun 2021 sampai dengan 2022:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1,43 %	1,61 %

Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda



dari tabel 3.6 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya,. pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai

pelaku/pendukung pertunjukan seni pada tahun 2022 mencapai 1,61 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2021 yang hanya mencapai 1,43 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi kenaikan sebesar 0,18 %.

Tercapai nya indicator ini didukung oleh kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM warisan Budaya Tak Benda yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu Ratih Saman Lingga, Silat Pengantin Kepulauan Riau dan Lipat kain 44 ,rencana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III di bulan Agustus 2022 sesuai anggaran kas.Meskipun telah terjadi Refocusing dalam APBD Dinas kebudayaan yang berpengaruh terhadap capaian,dinas kebudayaan tetap berkomitmen dalam pencapaian indicator dengan cara melakukan kordinasi ke kabupaten kota yang melaksanakan event kebudayaan dengan melibatkan masyarakat nya dalam pengembangan objek pemajuan kebudayaan,dan kegiatan-kegiatan pendukung dalam pencapaian indicator ini croscuting dengan bidang yang ada di dinas kebudayaan seperti partisipasi event ,festival kompong yang diikuti oleh majelis majelis taklim dari kabuapten/kota,Kenduri Seni Melayu – Tari Persembahan dan Tari Kreasi Melayu. antusia nya masyarakat untuk mengikuti kegiatan -kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas kebudayaan baik provinsi maupun kabuapten/kota seperti peningkatan kapasitas di bidang kebudayaan merupakan salah satu factor sehingga tercapai nya indicator penduduk yang terlibat sebagai pelaku /pendukung pertunjukan seni.



Grafik capaian kinerja

Dapat digambarkan pada Grafik ini Pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 1,43 % atau 2.1330. persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung dalam pertunjukan seni dan pada tahun 2022 capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan kan didalam perjanjian kinerja sebesar 1,49 % dan capaian kinerja sebesar 1,61 atau 3.122 orang dapat dilihat di setiap tahun ada peningkatan pada capaian kinerja sebesar 0,18 %.

Kendala yang dihadapi

1. Metode parameter dalam perhitungan/pengukuran jumlah penduduk yang pernah terlibat belum berjalan efektif untuk mengakomodir target yang sudah tercapai
2. kegiatan yang perlu bersinergi dengan komunitas, pemerintah daerah, serta masyarakat umum menjadikan koordinasi yang kurang optimal
3. masih banyak ditemukan masyarakat umum belum mengetahui dan memahami terkait warisan budaya tak benda dengan baik dan benar.

Solusi

1. Bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda akan Menyusun parameter pengukuran jumlah penduduk yang terlibat/pendukung dalam pertunjukan seni

2. Perencanaan dan pemetaan kegiatan yang lebih matang dalam sisi substansi dan anggaran, serta lebih beradaptasi dalam situasi pandemic jika itu terjadi lagi
3. Menekankan pada aspek keterlibatan yang luas dalam masyarakat dengan program yang lebih akurat, komprehensif dan efisien.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.128.012.248	1.127.925.242	Jumlah penduduk yang terlibat/pendukung pertunjukan seni	✓	

Tabel 3.7
Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni

No	Tgl/bln	kegiatan	tempat	Penyelenggara	Jumlah pelaku /pendukung pertunjukan seni
1	27 Agustus 2022	Pekan Buaya Daerah	Taman Pamedan, Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang	Pemerintah Kota Tanjungpinang	+ - 100 orang
2	3 September 2022	Pawai Budaya	Jl, H, Agus Salim sampai Gedung Gonggong Tanjungpinang	Pemerintah Kota Tanjungpinang	+ - 800 orang
3	10 September 2022	Festival Moon Cake (Keu Bulan)	Sepanjang Jalan Merdeka sampai Gedung Daerah, Tanjungpinang	Dinas Pariwisata Prov Kepri	+ - 1500 orang
	17 September 2022	Festival Kepri Berkompang	Gedung Nasional	Dinas Kebudayaan Provinsi	94 orang
	24-25 September 2022	Festival Sastra Internasional Gunung Bintan Tahun 2022	Gedung Aisyah, Gedung Daerah, Kedai Kopi Sekanak, dan UMRH	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri	118 orang
	2 Oktober 2022	Parade Pancak Silat (IPSI)	Costal Area Karimun Kab	Dinas Pariwisata dan IPSI Kabupaten Karimun	+ - 130 orang
	26 Oktober 2022	Festival Kompang	Gedung Community centre Teluk Sebong Kab. Binatn	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	170 orang

	12 Nopember 2022	Festival Gema Sholawat Kepulauan Riau Tahun 2022	Kab. Lingga	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	70 orang
	11 Desember 2022	Festival Musik, Tari dan Lagu Melayu Se – Kepulauan Riau	Gedung Daerah Tanjungpinang	Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau	140 orang
	Jumlah				3.122 orang

Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda

3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan

Pemerintah memiliki amanah Undang-undang dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya tentang kekayaan karya budaya daerah, salah satunya tentang pengetahuan ekspresi budaya tradisional, mencakup bentuk karya seni. Ekspresi budaya tradisional ini dapat terbagi dua yaitu warisan budaya berbentuk warisan benda (tangible) dan warisan tak benda (intangible). Bentuk ekspresi sebuah budaya tradisional (expression of folklore) yang mengandung nilai-nilai dan kearifan ragam budaya masyarakat lokal suatu daerah baik dalam bentuk warisan budaya berbentuk benda maupun warisan budaya tak benda (WBTB). Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten memiliki keanekaragaman seni dan budaya, dengan letak geografis yang sangat strategis dan memiliki keunggulan potensi yang beraneka ragam. Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan Budaya Melayu, bahkan Kepulauan Riau disebut sebagai Bunda Tanah Melayu, yang kemudian menjadi Visi Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk kebudayaan Melayu yang memiliki ciri khas dan perbedaan dengan budaya daerah lain, dapat dijadikan suatu cita-cita dalam melestarikan dan menunjukkan jati diri daerah, yang kemudian menjadi kekayaan budaya Indonesia. Penting untuk masyarakat di Kepulauan Riau untuk melihat pertunjukan seni secara langsung, baik itu karena memang ingin melihat maupun karena di undang untuk melihat atau mengikuti kegiatan dan even tertentu yang memiliki pertunjukan seni. Sehingga indikator pencapaian

jumlah penduduk yang melihat secara langsung pertunjukan seni. Dengan itu penting untuk berpartisipasi dalam even-even yang bisa menampilkan kebudayaan secara langsung. pada tahun 2022 banyak kegiatan event yang mendukung pencapaian indikator ini seperti partisipasi event ,Festival Aceh Perkusi 2022 – Musik Perkusi Melayu,festival kompang dan juga hibah yang terkait dengan kegiatan event di kabupaten/kota , Penampilan tari dan musik pada pembukaan porprov ke V Provinsi Kepulauan Riau, Salah satu indikator kinerja Program di Bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda adalah Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan dengan formula $\frac{\text{target penduduk yg menonton pertunjukan seni 10 thn keatas}}{\text{jumlah penduduk yg mnntn secara lgs pertunjukan seni 10 tahun keatas}} \times 100$ dengan target 51,01% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51,44 % ini melebihi dari yang ditargetkan didalam Perjanjian kinerja



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2021 realisasi sebesar 47,03 % pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 51,01 % atau 67.374 penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dengan realisasi kinerja sebesar 51,44 % atau 74.720 penduduk 10 tahun yang menonton secara

langsung pertunjukan seni dengan capaian kinerja sebesar 100,84 % dengan predikat "**sangat baik**"

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja penduduk 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dari Tahun 2021-2022 :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni

No	Indikator Kinerja	Realisas 2021	Realisasi 2022
1	penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni	47,03	51,44

Sumber data : Bidang Sejarah dan Adat tradisi



Berdasarkan Tabel diatas penduduk usia 10 tahun yang menonton secara langsung pertunjukan seni dengan target penetapan kinerja tahun 2022 sebesar 51,01 % realisasi 51,44 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 100,73 % , dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini "**sangat Baik**."

Dalam pencapaian target indicator dinas kebudayaan Provinsi intens melakukan kordinasi ke OPD Kabupaten/kota dan juga didukung oleh kegiatan kegiatan event yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan Untuk pencapaian target kinerja 67.374 orang jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni di lakukan secara inisiatif mendokumentasikan perkiraan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni setiap even kesenian yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Di setiap kegiatan Kabupaten Kota dan kegiatan kesenian se Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga pencapaian target perkiraan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni tercapai. Diperkirakan jumlah perkiraan penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni mencapai 74.720 orang ada pun kegiatan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target indicator ini sbb : PEKAN

KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG 27-28 AGUSTUS 2022 Pelaksana Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung pinang 2 PAWAI BUDAYA TAHUN 2022 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2022 PELAKSANA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG 3. KEPRI LANTERN 2022 DREAM PARADE 10 SEPTEMBER 2022 JL.MERDEKA –GEDUNG DAERAH - Pelaksanaan oleh Dinas Pariwisata Prov Kepri 4 FESTIVAL SASTRA GUNUNG BINTAN Tanggal 24 – 26 September 2022 di Tanjungpinang Pelaksana Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Perkiraan dengan penonton Online 5 Peringatan Hari Jadi Museum Batam Raja Ali Haji Ke- 2 Tanggal 14 Oktober 2022 di Kota Batam 200 6 PERINGATAN HARI JADI SANGGAR SENI JAWA MADYO LARAS KE 10 TAHUN “ANNIVERSARY 10 TAHUN SANGGAR SENI JAWA MADYO LARAS” TANGGAL 10 OKTOBER 2022 Jl Pramuka Lorong Nias Kota Tanjungpinang ,7 PAGUYUBAN PASUNDAN TANJUNGPINANG MILAD KE 2 SANGGAR SENI PARAGUNA Tanggal 01 Oktober 2022 250 8 SEMPENA HARI JADI KABUPATEN KARIMUN PARADE PENCAK SILAT -KARIMUN EXPO - PEMILIHAN DUTA BUDAYA KABUPATEN KARIMUN, 9 PAGELARAN PESONA SENI DAN BUDAYA MELAYU ke 4 KAB. ANAMBAS Tanggal 28 September 2022 10 PERINGATAN ULANG TAHUN KE 3 PEMUDA BATAK BERSATU Tanggal 14 Oktober 2022 di Tanjungpinang ,11 Kegiatan Festival Kompang 26 Oktober 2022Dinas Kebudayaan Prov Kepulauan Riau, 12 Festival Pantun Kepulauan Riau 24 -28 Oktober 2022 Penyelenggara Lembaga Pelestari Nilai Adat dan Tradisi (PESILAT) Lokasi Mall TCC Tanjungpinang 24-28 Oktober 2022 300 13 Festival Pelajar Nusantara 27 -28 Oktober 2022 RRI dan Dinas Pariwisata Prov Kepulauan Riau, 14 Joget Dangkong Mak Dare “ kembali di Ingatan” 27 Oktober 2022 Penyelenggara komunitas SEHATI bekerjasama dengan BPNB Lokasi pelataran parkir Gedung Gonggong Tanjungpinang 100 15 KEGIATAN GOPTKI PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA BAGI TENAGA PENDIDIK PAUD TH 2022 TARI PERSEMBAHAN DARI TAMAN KANAKKANAK PEMBINA 1 TANGGAL 3 NOVEMBER 2022 200 16 MUBES IV LAM TAHUN 2022 TANGGAL 30 OKTOBER 2022 PELAKSANA LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU 200 17 FESTIVAL SUMPAH PEMUDA KEPRI 2022 “Merdeka Berkreasi, Bersatu Bangun Bangsa” 28 Oktober 2022 Penyelenggara Pemprov Kepulauan Riau Lokasi jl Merdeka Tanjungpinang 18 RAGAM BUDAYA MELAYU - ASPARNAS KEPRIFEST 2022

Pelaksana Kegiatan Sanggar Lembayung, GERAM dan Puan Geram Kepri Bersatu
 Senin, 12 Desember 2022 19 KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 PERESMIAN OPERASI 13 PENGADILAN TINGKAT BANDING BARU DAN 38
 GEDUNG PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 5 Desember 2022 20 FESTIVAL
 MUSIK, TARI DAN LAGU MELAYU LAM KEPRI 2022 Pelaksana Kegiatan LEMBAGA
 ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU Minggu, 11 Desember 2022 300 21 FESTIVAL
 BUDAYA MELAYU – PERKUMPULAN SELINSING KOTA BATAM 2022 Pelaksana
 Kegiatan Perkumpulan Selinsing Kota Batam Jumat- Sabtu , 16-17 Desember 2022, 22
 FESTIVAL GURINDAM 12 PURNAMA PULAU PENYENGAT Pelaksana Kegiatan
 TANKCER DANCE STUDIO 2-3 Desember 2022,

Tabel 3.9
Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton pertunjukan seni

No	Bulan	Realisasi		Target Per tahun	
		Jumlah penonton Usia 10 thn keatas (orang)	Persentase Capaian Per Bulan	Persentase Capaian Per tahun	Jumlah Penduduk Usia 10 thn ke atas yang menonton pertunjukan seni
					Kuantitatif
1	Januari	2,500	44.53	3.71	67374
2	Februari	3,000	53.43	4.45	67374
3	Maret	3,500	62.34	5.19	67374
4	April	3,000	53.43	4.45	67374
5	Mei	1,000	17.81	1.48	67374
6	Juni	1,000	17.81	1.48	67374
7	Juli	2,070	36.87	3.07	67374
8	Agustus	12,700	226.20	18.85	67374
9	September	34,300	610.92	50.91	67374
10	Oktober	4,900	87.27	7.27	67374
11	November	5,400	216.00	8.01	67374
12	Desember	1,350	135.00	2.00	67374
		74,720	130.13	110.90	

Sumber data Bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda

Kendala Yang dihadapi

1. Terkait pada masa Pandemi Covid-19 terjadi beberapa kali refocussing anggaran untuk penyesuaian anggaran untuk tahun 2022 ini. Sehingga Kegiatan Partisipasi Even tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Ini dapat dilihat dengan kegiatan-dari komunitas yang menghadiri undangan di daerah 36 lain tidak dapat didukung dengan anggaran partisipasi even sebagai bentuk partisipasi even dari Provinsi Kepulauan Riau.
2. Target kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki target jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni sebanyak 67.374 orang. Anggaran kegiatan Partisipasi Even tersebut tidak memadai, karena hanya mampu mengakomodir permintaan dari OPD di Provinsi Kepulauan Riau dan beberapa permintaan dari instansi serta komunitas lain untuk penampilan Tari Persembahan, Tari Kreasi dan Musik hidup. Untuk hal ini hanya tercapai 17 Partisipasi dalam berbagai macam permintaan dan undangan penampilan

Solusi

1. Anak Sub kegiatan Partisipasi Even sebagai kegiatan di Dinas Kebudayaan sangat berperan penting sebagai salah satu kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja dan perlu untuk tetap dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan bentuk kegiatan yang lebih luas lagi. Tidak sekedar hanya memenuhi permintaan tari persembahan, tari kreasi dan musik melayu akan tetapi juga berpartisipasi pada even kegiatan seni dan budaya di Provinsi lain baik skala nasional dan internasional. Sehingga seni dan kebudayaa Melayu Kepulauan Riau lebih banyak dikenal dan dilihat langsung oleh masyarakat di daerah lain. Untuk itu perlu pagu anggaran yang memadai demi pencapaian seni budaya Melayu Kepulauan Riau dikenal lebih luas dan dilihat secara langsung oleh penduduk Provinsi Kepulauan Riau di daerah lain khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga lebih mengenalkan Provinsi Kepulauan Riau ke berbagai daerah lain di Indonesia dan Internasional.

2. Pentingnya monitoring dan perjalanan ke kabupaten kota untuk untuk pengambilan data lebih akurat dan melihat langsung penduduk yang menonton pertunjukan seni secara langsung di kabupaten kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Penting ada nya kalender even Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga akan lebih akurat dalam pendataan secara langsung.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	471.480.718	470.535.954	Jumlah penduduk yang menonton pertunjukan seni	✓	

4. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Rencana Kerja Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait dengan

adat tradisi, karya budaya tak benda dan tenaga adat tradisi. Pada tahun 2022 terkait dengan karya Budaya tak benda Bidang adat Tradisi mempunyai target sebesar 16,75 % atau 2 (dua) karya budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi, pelestarian warisan budaya terutama terkait dengan Karya Budaya Tak Benda yang pada saat ini berbagai kondisi yang dihadapi salah satunya adalah terancam punah dan warisan budaya yang ada diperbatasan rentan pengakuan negara lain sehingga perlunya pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan terhadap Karya Budaya tak benda yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan cara mengusulkan karya budaya tak benda untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan Teknologi. Selanjutnya Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan evaluasi dengan melalui laporan evaluasi Kinerja Bidang setiap triwulan, laporan ini memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja serta realisasi anggaran. Evaluasi terhadap hasil Renja Bidang dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Bidang dapat dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi.

Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan realisasi jumlah karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dengan jumlah total registrasi. Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan Budaya Tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Untuk tujuan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada Warisan Budaya Takbenda yang kompatibel dengan instrumen hak asasi manusia

internasional yang ada, serta dengan persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok dan individu, dalam upaya pembangunan berkelanjutan).

karya budaya yang dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia dari tahun 2013 sampai 2021 ada 76 buah karya budaya. Pada tahun 2022 karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia menjadi 80 buah karya budaya, yang artinya ada penambahan 4 (empat) karya budaya yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sebagai WBTB Indonesia.



Grafik ini menggambarkan pada tahun 2021 realisasi sebesar 23,45 % atau 76 warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ,pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 16,75 % atau 2 karya budaya yang ditetapkan terhadap total registrasi dengan realisasi kinerja sebesar 18,43 % atau 4 karya budaya yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 110,03 % dengan predikat “**sangat baik**” setiap tahunnya ada peningkatan sebesar 1,84 %.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase warisan budaya tak beda yang ditetapkan terhadap total registrasi dari Tahun 2021-2022:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi

No	Indikator Kinerja	Realisas 2021	Realisasi 2022
1	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi	23,45	18,43

Sumber data bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda



berdasarkan Tabel diatas warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi dengan target penetapan kinerja tahun 2022 sebesar 16,75 % realisasi 18,43 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 110,03 % , dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini **"sangat Baik**. indikator warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi pada tahun 2021 mencapai 23,45 % dan telah mencapai dari target yang telah ditetapkan, warisan budaya tak benda yang telah di tetapkan sebagai warsian budaya tak bneda Indonesia oleh direktorat kebudayaan sampai dengan 2021 sebanyak 76 karya budaya pada tahun 2022 indikator ini mencapai 18,43 % sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,84 %. Pada tahun 2022 Dinas kebudayaan mengusulkan Karya Budaya sebanyak 14 karya budaya tetapi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta sebanyak 4 (empat) karya budaya yaitu 1. Pento ,Pento merupakan alat tangkap yang diberi umpan untuk menjerat ketam bangkang. Pento menggunakan umpan daging ikan dan menggunakan jerat jaring berbahan tali nilon. Pento dibuat dari sebatang kayu kecil sebesar ibu jari orang dewasa, rotan, dan jaring tali nilon. Untuk menggunakan pento, nelayan menunggu air pasang. Setelah air

pasang, pento dipasang umpan dan dicacakkan pada tepi sungai, suak atau pun di tepi pantai. Sebelum air surut, pemasang akan memeriksa pento dan jika beruntung, ketam bangkang bakal terjerat. 2. Tamban Salai, Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian bekerja menjaring ikan tamban. Ikan tamban sejak lama telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau pulau kecil di Kabupaten Lingga. Nelayan penjaring tamban dapat ditemukan di wilayah Kecamatan Lingga dan Kecamatan Singkep Pesisir. Penghasil tamban di Kecamatan Lingga khususnya di Desa Lanjut dan Pulau Mepar, 3. Malam Nisfu Syakban Tradisi Malam Nisfu Syakban masuk ke wilayah Lingga diperkirakan bersamaan dengan masuknya ajaran Islam ke Lingga. Masuknya agama Islam ke Lingga dipengaruhi dari perkembangan Islam di Kerajaan Melaka. Agama Islam masuk ke Melaka awal pada abad ke-15 dan menyebar ke wilayah-wilayah taklukan termasuk Lingga. Raja Kecil Besar penguasa Melaka yang pertama masuk Islam mengganti nama sebagai Sultan Muhammad Syah, dan baginda juga berhasil menguasai wilayah Lingga. Wilayah-wilayah taklukan yang dikuasai Melaka juga menerima ajaran Islam. Tradisi malam nisfu Syakban merupakan amalan para pengikut Ahlussunnah wal Jama'ah 4. Pengapit Santan, faktor penghambat pada indikator ini yaitu kurang nya respon Kabupaten/kota dalam menginventarisasi dan pengusulan karya bUdaya tak benda, Keberhasilan Indikator ini didukung oleh kegiatan pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda , kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali karya budaya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI Jakarta dan memperkenalkan kembali kepada masyarakat khusus nya generasi muda tentang karya budaya yang dimiliki oleh kepulauan Riau.

Adapun Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan terhadap total registrasi

No	Karya Budaya	TAHUN 2017 s/d 2021	TAHUN 2022		Ket
	Kepri total registrasi	Jumlah karya Budaya menjadi WBTB	Karya Budaya menjadi WBTB	Jumlah Karya Budaya Menjadi WBTB	
1	257	76	4	80	Pada tahun 2017 s/d 2021 sudah 76 karya budaya yang ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia oleh kemendiburistek Jakarta smapai dengan tahun 2022 sudah 80 warisan budaya tak benda provinsi kepulauan riau yang ditetapkan oleh pusat.
	Total	76	4	80	

Sumber data Bidang adat tradisi dan karya budaya tak benda

Kendala Yang dihadapi

- Belum lengkapnya data inventarisasi budaya tak benda di Dinas kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.
- Kurang karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya tersebut membuat karya budaya tersebut hanya sebagi pencatatan sebagai karya budaya tidak bisa dilanjutkan untuk pengusulan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia
- Kurang nya maestro atau tokoh setempat yang berkompeten dikarenakan maestro tersebut tidak begitu Fokus dalam pewarisan dan pembinaan sebuah karya budaya

Solusi

- Perlu nya dilakukan Updating pemetaan dan pendataan yang terarah dengan koordinasi pemerintah setempat dan UPT Kemendikbud dalam hal ini BPNB Tanjungpinang untuk melakukan kerjasama kegiatan

tersebut

- Perlunya dilakukan bimtek untuk pembuatan film/video documenter standar yang jelas tentang karya budaya sehingga maksud dan tujuan yang dibutuhkan dalam dokumentasi tersebut terpenuhi.
- Perlu nya kerjasama yang intens dengan UPT Kemendikbud Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Tanjungpinang yang meliputi wilayah kerja provinsi kepulauan riau dan kalangan akademisi yang ada di provinsi kepulauan riau

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	563.994.748	562.841.774	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan	✓	

5. Persentase SDM Sejarah yang berkompetensi

Sejarah dan Budaya merupakan identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan

anak cucu kita kelak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sejarah lokal secara umum dapat didefinisikan sebagai sejarah aktivitas manusia di suatu wilayah yang dibatasi oleh batas geografis dan administratif. Dan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sejarah lokal merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dan pelakunya berasal dari suatu wilayah tertentu, dimana jalannya peristiwa tersebut maupun tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya dapat dipengaruhi atau mempengaruhi sejarah nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kapasitas sejarah budaya inilah yang hendak dilestarikan sebagai bagian pengembangan aset kekayaan budaya daerah. Secara historis wilayah kita memiliki keunikan baik dilihat dari peninggalan masa pra-aksara, masa sejarah hingga peranan sebagai basis Bahasa di tanah air. Karakteristik lokal tersebut perlu diperkenalkan dan ditanamkan sejak dini, khususnya kepada anak-anak dan generasi penerus. Hal ini penting agar sumber daya manusia yang diharapkan kelak memiliki karakteristik yang berbasis lokalitas ke melayu-an dengan segala dinamikanya. Upaya strategis penanaman karakteristik tersebut adalah melalui jalur pendidikan, mulai dari pendidikan dasar dan menengah atas hingga perguruan tinggi. Penerapan nilai-nilai sejarah dan budaya melalui lembaga pendidikan secara berjenjang dan sistematis akan membuat pengenalan ini lebih efektif tidak saja pada hal-hal yang bersifat fisik yang semakin lama makin pudar kekhasannya tetapi juga pada nilai-nilai positif yang dibangun didalamnya. Evaluasi terhadap Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dengan target 15 orang sejarahwan yang berkompetensi atau 20 % dari 75 sejarahwan yang ada di Kabupaten/kota dikali 100 %

Hasil evaluasi Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dengan target sebesar 20,00 % dapat tercapai hanya sebesar 20,00 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 100 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **“baik”**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi dari Tahun 2021-2022:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Persentase SDM Sejarahwan yang berkompetensi	20,00	33,33

Sumber data bidang Sejarah dan Permuseuman



dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2021 capaian kinerja yang dicapai sebesar 20,00 % atau 15 sejarahwan yang berkompetensi dan pada tahun 2022 realisasi capaian sebesar 33,33 % atau 15 sejarahwan yang berkompetensi Yang terlibat dalam kegiatan Dinas kebudayaan sebagai bentuk apresiasi kepada sejarahwan yang di kabupaten/kota, Kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan salah satu upaya membangun kesadaran akan potensi sumber sejarah daerah yang ada dalam masyarakat dan mendorong tumbuhnya budaya tulis di kalangan anak muda dalam penafsiran dan penuturan sejarah daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Kegiatan dimulai dengan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang data SMA/SMK Sederajat Se Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang., untuk Dewan Juri Melibatkan 15 Para Penulis Sejarah Lokal yang berkompeten dan dilaksanakan rapat bersama panitia untuk membahas tema dan juknis kegiatan. dengan Tema Menumbuh Kembangkan Kecintaan dan Kesadaran Sejarah Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Peserta SMA/SMK Sederajat Se Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Ketentuan Umum : Judul karya tulis bebas tetapi mengacu pada salah satu tema berikut :

- a) Biografi tokoh lokal
- b) Peristiwa sejarah di daerah masing-masing
- c) Revolusi nasional di tingkat lkal
- d) Interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal

- e) Perkembangan daerah tertentu dari masa ke masa
- f) Jalur rempah



Grafik Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2021 realisasi sebesar 20,00 % atau 15 orang sejahteraan yang berkompetensi. Pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 40,00 % atau 15 orang sejahteraan yang berkompetensi, realisasi sebesar 33,33 %capaian kinerja ini sebesar 83,33% dapat dikategorikan capaian kinerja “**baik**”

6. Persentase benda, bangunan,struktur, situs, dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi adalah warisan budaya kebendaan yang sudah dilestarikan berupa cagar budaya yang sudah dilindungi atau dalam kondisi baik.

Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan dari jumlah cagar

yang sudah dilindungi ditetapkan atau cagar budaya dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Tahun 2022 dapat digambarkan pada tahun 2016-2021 yang sdh ditetapkan sebanyak 9.998 cagar budaya, total cb yg registrasi 10.218 yang blm ditetapkan 220 setiap tahun nya disbud menargetkan tahun 2022 9 cagar budaya,

Hasil evaluasi Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dengan target sebesar 31,75% dapat tercapai hanya sebesar 30,51 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 96,10 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **“baik”**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dari Tahun 2021-2022:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah
ditetapkan terhadap total registrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	30,06	30,15

Sumber data : Bidang cagar budaya



dari tabel 3.13 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi pada tahun 2022 mencapai 30,51 % sedangkan yang ditarget kan sebesar

31,75 bila dibandingkan pencapaian Tahun 2021 yang hanya mencapai 30,06 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi kenaikan sebesar 0,45 % cagar budaya yang sudah ditetapkan ditingkat nasional, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 menjelaskan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tahap awal proses penetapan cagar budaya adalah pendaftaran. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.

Proses pendaftaran objek diduga cagar budaya (ODCB) dimulai dari pendaftaran oleh Tim pendaftaran di kabupaten/ kota di mana ODCB berada. Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten/ Kota untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Hasil kajian TACB tersebut menjadi rekomendasi bagi kepala daerah (bupati atau walikota) untuk menetapkan atau tidak menetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten/ Kota

Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten/ Kota, kemudian dapat diusulkan untuk pemeringkatan status menjadi peringkat Provinsi melalui kajian dan rekomendasi dari TACB Provinsi Kepulauan Riau. Hasil kajian dan rekomendasi TACB Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi dasar pertimbangan bagi Gubernur Kepulauan Riau untuk menetapkan status Cagar Budaya Peringkat Provinsi. (Pasal 43 dan 45

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015).

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama cagar budaya yang telah mendapat status penetapan sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 75 dan 76 tentang Pemeliharaan. Pemeliharaan sebagai salah satu upaya perlindungan adalah pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama cagar budaya yang telah mendapat status penetapan maupun ODCB. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Untuk itu diperlukan tenaga juru pelihara (jupel) yang mempunyai tugas merawat, memelihara dan menjaga keamanan cagar budaya (UU No. 11 Tahun 2010). Jupel adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan Pemeliharaan Cagar Budaya.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2021 realisasi sebesar 30,06 % cagar budaya yang ditetapkan tingkat nasional. Pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 31,75 atau 9 cagar budaya yang ditetapkan tingkat nasional realisasi hanya 30,51 % atau 1 Cagar budaya yang ditetapkan, ini dikarenakan ada nya dampak dari refocusing pada kegiatan penetapan cagar budaya sehingga dinas

kebudayaan tidak dapat maksimal dalam melaksanakan kegiatan ini, capaian kinerja ini sebesar 97,54 dapat dikategorikan capaian kinerja “**baik**”

Adapun Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dalam dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Persentase benda,bangunan,struktur,situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

No	Total benda,banguann ,struktur,situs,Ka wasan cagar budaya total registrasi kabupaten/kota	Tahun 2016/2021		Tahun 2022		Total benda,banguann,STRU ktur,situs,Kawasan cagar budaya total registrasi kabupaten/kota yang belum ditetapkan
		Yang sudah ditetapkan	Yang belum ditetapkan	Target Yang ditetapkan Tingkat nasional	Realisasi yang ditetapkan Tingkat nasional	
1	10.218	9.998	220	9	1	219
Total		9.998	220	9	1	219

Kendala yang dihadapi

- a. Masih banyak Cagar Budaya di Kepulauan Riau bernilai penting sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, religi, pariwisata yang belum ada Juru Pelihara.
- b. Penambahan Juru Pelihara tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran dana untuk honor dan quota Juru Pelihara Cagar Budaya yang terbatas 13 orang.
- c. Belum ada Standar Operasional Prosedure (SOP) Pemeliharaan Cagar Budaya secara terpadu di lingkungan Cagar Budaya.
- d. Bahan pendukung juru pelihara belum lengkap.
- e. Terdapat beberapa kasus Juru Pelihara tidak dapat melaksanakan pemeliharaan secara maksimal karena adanya benturan dengan kepentingan pengelola Cagar Budaya.
- f. Rasa memiliki Cagar Budaya sebagian dari masyarakat yang masih rendah sehingga belum mendukung sepenuhnya upaya pemeliharaan Cagar Budaya.

- g. Tidak adanya anggaran terhadap bahan pendukung juru pelihara

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

- Kurangnya anggaran terhadap Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam melaksanakan tugas yang efektif.
- Belum adanya sekretariat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).
- Belum adanya saranan terhadap Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Solusi

- Perlu penambahan Juru Pelihara untuk pemeliharaan Cagar Budaya di Kab/Kota yang mempunyai nilai penting sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, religi, pariwisata.
- Standar Operasional Prosedure (SOP) Pemeliharaan Cagar Budaya secara terpadu di lingkungan Cagar Budaya.
- Perlu peningkatan koordinasi dalam pelestarian Cagar Budaya lintas sektoral.
- Perlu peningkatan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat luas.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

- Perlunya penambahan anggaran kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam melaksanakan tugasnya
- Harus adanya sekretariat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian

1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	310.195.200	310.106.600	Jumlah penetapan cb peringkat provinsi ditetapkan	✓	
2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	121.905.128	119.980.197	Jumlah cagar budaya yang lestari	✓	

7. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan permuseuman, sub bidang permuseuman melakukan kunjungan dan koordinasi ke 7 Kabupaten/Kota untuk saling memberikan informasi dan menginventarisasi terhadap koleksi museum, serta membahas minat masyarakat dalam mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan museum. Sebagai tempat yang pernah menjadi pusat kerajaan Johor-Riau-Lingga dan merupakan jalur rempah sehingga kawasan Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak peninggalan sejarah. Yang mana peninggalan sejarah ini tersebar di 7 kabupaten/kota baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar.

Dalam pemenuhan capaian target persentase kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum / peninggalan sejarah/warisan dunia, sub bidang permuseuman pada tahun 2022 hanya menfokuskan pada perhitungan kunjungan ke museum dan pulau Penyengat yang merupakan kawasan cagar budaya yang sedang diusulkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Data kunjungan ini didapat dari:

-Museum Sultan Sulaiman Badrul, Tanjungpinang

- Museum Bahari Bintan, Bintan
- Museum Raja Ali Haji Batam Centre, Batam
- Museum Linggam Cahaya, Lingga
- Museum Sri Serindit, Natuna
- Pulau Penyengat

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah merupakan perbandingan realisasi jumlah kunjungan masyarakat dibagi dengan total penduduk usia 10 tahun secara keseluruhan kab/kota di kali 100 %

Hasil evaluasi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dengan target sebesar 12,76 % dapat tercapai sebesar 13,17 % sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 103,27% atau dalam kategori kinerja “ **sangat baik** ”

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dari Tahun 2021-2022 :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12,04	13,17

Sumber data : Bidang sejarah dan permuseuman



Dilihat dari tabel 3.15 menunjukkan Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator ke tujuh yaitu **Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah** yang pada Tahun 2022 dengan target

12,76 % realisasi sebesar 13,17 %,capaian kinerja nya melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 103,21 %, dibanding dengan realisasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,13 % Keberhasilan dari Indikator ini didukung dari kabupaten /kota yang telah melaksanakan Pada galeri Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau terdapat 13.280 buah koleksi. Jumlah koleksi yang jumlahnya terbilang banyak, tidak sebanding dengan kapasitas penyimpanan galeri Dinas Kebudayaan. Sehingga sebagian koleksi yang berada dalam penyimpanan dengan suhu dan pencahayaan yang kurang baik dan dapat merusak bahan koleksi. Oleh karena itu pada tahun 2022 sub bidang permuseuman melakukan pengadaan lemari sebanyak 6 buah.

Pada tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan berencana mengalihfungsikan bangunan yang terbengkalai untuk dijadikan museum. Rencana tersebut juga disejalkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor surat 400.4.2/ 12403/ SJ tertanggal 16 November 2022 tentang pendaftaran museum. Guna menunjang rencana pada tahun anggaran 2023 tersebut sub bidang permuseuman melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana museum. Adapun yang dilakukan adalah penyiapan gedung yang diperuntukan untuk museum, menambah tata pamer atau lemari *display* agar dapat menampilkan koleksi museum secara keseluruhan dan maksimal.

Selain itu sub bidang permuseuman berkonsultasi Terkait Pendaftaran Museum ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta mengenai bagaimana pendaftaran museum dan apa saja persyaratan serta dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran tersebut. Adapun syarat untuk pendaftaran museum, antara lain:

- ✚ Memiliki visi dan misi
- ✚ Memiliki koleksi
- ✚ Memiliki lokasi dan/atau bangunan: Sertifikat (kepemilikan) tanah dan bangunan (SK Pendirian)
- ✚ Memiliki sumber daya manusia: SDM atau pegawai dengan status tidak

harus PNS (ditandai dengan SK: kepala museum, kurator, register, konservator, administrator dan pengamanan)

- ✚ Memiliki sumber pendanaan tetap

- ✚ Memiliki nama Museum

Pada tahun 2022 terdapat kendala dalam mendapatkan data kunjungan penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia karena belum adanya data valid tempat-tempat bersejarah dan tidak semua tempat sejarah memiliki instrument perhitungan kunjungan. Belum terawatnya semua tempat sejarah yang ada di Kepulauan Riau. Oleh karena itu data yang ditampilkan ialah jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi museum sebagai tempat penyimpanan sejarah dan penyengat



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada setiap tahun nya terjadi peningkatan pada tahun 2022 realisasi sebesar 13,17 dengan target 12,76 % ada nya kenaikan capaian 0,14 % atau 19.117 penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan bersejarah 103,21% dapat dikategorikan capaian kinerja “sangat baik”.

Adapun Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Persentase Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah

Data kunjungan perbulan kab/kota	Jumlah Penduduk 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah
Januari	1427
Februari	1431
Maret	1100
April	1453
Mei	2036
Juni	1139
Juli	3179
Agustus	2718
September	1021
Oktober	1156
November	1112
Desember	1345
JUMLAH	19.117

Sumber data kab/kota dan bidang sejarah dan permuseuman

Kendala Yang dihadapi

1. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini ialah belum adanya sumber daya manusia yang berasal dari study permuseuman, untuk sementara dilaksanakan konsultasi pengelolaan museum dengan kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau yang sudah memiliki museum terlebih dahulu sehingga mendapatkan ilmu dan dipraktikkan.

2. Belum mendapatkan data valid penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia karena belum tersebar dengan maksimal instrument di tempat sejarah.
3. Belum terjalin dengan baik koordinasi terhadap dinas terkait 7 kabupaten/kota yang menaungi tempat tempat peninggalan sejarah

Solusi

1. Dalam pengembangan kemampuan pemeliharaan koleksi galeri museum yang baik untuk kedepannya, perlu mengikuti diklat tentang permuseuman.
2. Perlu *sharing* informasi dan pertukaran pengalaman dengan koordinasi terhadap dinas terkait 7 kabupaten/kota yang menaungi tempat sejarah dan museum
3. Perlunya kerjasama antara Bidang Sejarah dan Permuseuman dengan bidang cagar budaya dalam mendata masyarakat di atas 10 tahun yang mengunjungi tempat bersejarah

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	345.663.616	344.962.381	Jumlah penduduk yang mengunjungi tempat sejarah	✓	

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dialokasikan dalam anggaran kegiatan maupun rutinitas perkantoran sebagai penunjang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004.

Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 17.335.070.424 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 8.132.734.800 dan Belanja Langsung Rp 9.202.335.624. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp 17.040.930.929,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.839.975.575,00 dan Belanja Langsung Rp 7.200.955.354,00.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indicator	Kinerja			Anggaran		
			Target	realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	28,11	28,11	100	1.506.034.870	1.305.722.740	86,70
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1,49	1,61	108,35	1.128.012.248	1.127.925.242	99,99
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	51,01	51,44	100,85	471.480.718	470.535.954	99,80

		Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16,75	18,43	110,04	563.994.748	562.841.774	99,80
		Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	40,00	33,33	83,33	1.585.773.614	1.534.216.768	96,75
		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	31,75	30,51	96,10	410.413.300	409.924.114	99,88
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	12,76	13,17	103,21	345.663.616	344.962.381	99,80

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.



BAB IV PENUTUP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2022 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Secara umum Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2022-2026. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Faktor keberhasilan pencapaian target adalah peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya yang didukung dengan pendanaan kegiatan dari kepala daerah untuk Bidang Kebudayaan.
2. Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut :
 - a. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Kualitas Budaya
 - b. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
 - c. Adanya Program-Program terkait Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
 - d. Ketersediaan Pendanaan melalui dana APBD untuk bidang kebudayaan

- e. Peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya , contohnya antusiasme dan partisipasi masyarakat (masyarakat umum dan dari sekolah) yang tinggi dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
 - f. Adanya dukungan dari stakeholder kebudayaan yang lain dalam pelaksanaan program kegiatan, seperti Berhasilnya sinergi antara Dinas Kebudayaan dengan lembaga terkait seperti instansi vertikal Kebudayaan (BPNB), lembaga non pemerintahan/LSM dan komunitas/penggiat kebudayaan dan seni serta masyarakat umum dalam upaya penyadaran pelestarian, hingga pengembangan kebudayaan dan seni.
 - g. Peran aktif guru dan siswa SD dan SMP yang melestarikan seni budaya di provinsi kepulauan riau.
 - h. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :
- Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

4. Strategi Menghadapi Hambatan ke depan:

- a. Kegiatan yang bersifat pentas, festival dilaksanakan secara daring dan luring (hybrid) serta dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan melihat perkembangan situasi perkembangan Covid-19.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, sebagai sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif. ditetapkan setiap tahun nya oleh Dinas Kebudayaan sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian indicator setiap tahunnya

Demikian pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan 2022 semoga dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

4.1 Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2022

Dinas kebudayaan telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, Dinas Kebudayaan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional tahun 2022

- Penghargaan warisan budaya tak benda yaitu pantun sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh Badan Khusus PBB UNESCO .
- Dinas Kebudayaan pada tahun 2022 memperoleh 4(empat) sertifikat atas penetapan menjadi Warisan Budaya Tak benda Nasional oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan sbb :
 - *Peto*
 - *Tamban salai*
 - *Malam nisfu syakban*
 - *Pengapit santan*

LAMPIRAN



Sertikat warisan budaya tak benda yaitu PANTUN sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh Badan Khusus PBB UNESCO .



Penyerahan Sertifikat oleh Sekretaris Jendral Kemendikbudristek ibu Ir Suharti, MA.M kepada gub kepri yg diwakili oleh kepala dinas kebudayaan prov kepri Drs.Dr Juramadi Esram







**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	%	28,11
2	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan budaya	%	48,84
3		Nilai Ekspresi budaya	%	1,49

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr.Drs.H.M JURAMADI ESRAM, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, November 2022

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya	Nilai Ekonomi Budaya	28,11%
2.	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	48,84%
		Nilai Ekspresi Budaya	1,49%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 2.163.487.714,-	APBD-P
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 1.506.034.870,-	APBD-P
3.	Program Pembinaan sejarah	Rp. 1.585.773.614,-	APBD-P
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 531.508.428,-	APBD-P
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 345.663.616,-	APBD-P

Tanjungpinang, November 2022

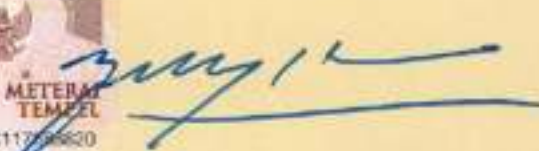
**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**




Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2022

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003

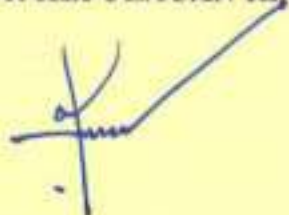
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Berbasis Budaya	Nilai Ekonomi Budaya	28,11%
2.	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	48,84%
		Nilai Ekspresi Budaya	1,49%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 2.336.555.844	APBD
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 1.276.651.344	APBD
3. Program Pembinaan sejarah	Rp. 1.687.662.364	APBD
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 577.307.428	APBD
5. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 311.834.016	APBD

Tanjungpinang, Januari 2022

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. Drs. H. M. JURAMADI ESRAM, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651219 199112 1 003



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Nilai Ekonomi Budaya	%	28,11	28,11	100,00	Tercapai
2	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Warisan budaya	%	48,84	49,54	101,43	Tercapai
		Nilai Ekspresi budaya	%	1,49	1,61	108,05	Tercapai

NO	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.163.487.714	2.161.302.970	99,90
2	PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.506.034.870	1.305.722.740	86,70
3	PEMBINAAN SEJARAH	1.585.773.614	1.534.216.768	96,75
4	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	531.508.428	528.904.311	99,51
5	PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	345.663.616	344.962.381	99,80

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr.Drs.H.M JURAMADI ESRAM, MT
Pembina Madya Utama
NIP.19651219 199112 1 003